



Pendahuluan

Kesejahteraan rakyat di Indonesia terjadi fluktuasi dalam dua dekade terakhir. Fluktuasi ini disebabkan antara lain oleh faktor krisis finansial, makro ekonomi, pemerintahan, dan lemahnya keberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

© Lemahnya keberdayaan masyarakat ini tampak dari tingkat kemandirian, partisipasi, kemampuan warganya akses terhadap pengelolaan sumberdaya dan beradaptasi terhadap perubahan di lingkungannya (Sumardjo, 2010a).

Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin 15.1 juta terus meningkat sejalan dengan krisis ekonomi dan puncaknya pada tahun 1998 sebesar 24.2 juta lalu menurun dan pada tahun 2006 sebesar 16.6 juta (<http://www.bappenas.go.id>, Agustus 2010). Mengacu pada garis kemiskinan satu dollar per hari di Indonesia setara dengan Rp. 97.000 per bulan atau kurang dari separuh garis kemiskinan nasional versi BPS, angka kemiskinan sekitar 20,6% pada 1990 dan 7,5% pada 2006 (<http://www.bappenas.go.id>).

Pada tahun 2009 dengan perhitungan yang berbeda jumlah penduduk miskin versi BPS sebesar (9.8%) atau 32.5 juta (www.bps.go.id), yaitu 11.9 juta (10.7%) dari jumlah penduduk berada di perkotaan dan 20.6 juta (17.4%) di perdesaan. Berdasarkan garis kemiskinan ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs yaitu 10%, meskipun tampaknya berhenti di situ dan belum ada peningkatan, Ditinjau dari indek kedalaman kemiskinan juga terjadi stagnasi (www.bappenas.go.id) pada tahun 1990 sebesar 2.7% dan pada tahun 2008 sebesar 2.7%. Berdasarkan perhitungan pada garis kemiskinan 2 dollar per hari kemiskinan di Indonesia 49.0%. Indek kemiskinan nasional pada tahun 1990 sebesar 15.1% dan tahun 2008 sebesar 15.4%, sedangkan target sebesar MDGs 7.5% (www.bappenas.go.id).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengiklankan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Keadaan tersebut mengindikasikan perlunya perhatian serius dan upaya perbaikan yang mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Semakin disadari perlunya upaya yang efektif untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapital manusia dan kapital sosial. Salah satu alternatif penting untuk itu adalah kegiatan penyuluhan pembangunan (Sumardjo, 2009).

Sistem penyuluhan yang dominan dengan kepentingan Pusat, ternyata berdampak kurang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa sistem penyuluhan yang partisipatif dan adanya konvergensi kepentingan masyarakat dan pemerintah ternyata berdampak memberdayakan (Sumardjo, 1999; Sumardjo, 2008).

Selain dengan itu, pengalaman di Brasilia (Freire, 1975) dalam transisi pendekatan tersebut diperlukan pendekatan pemecahan masalah kemiskinan yang cepat dan tepat, yaitu pemecahan bersama dengan rakyat, dan bukan pemecahan untuk rakyat atau dengan memaksa rakyat. Servaes (2007) juga mengungkapkan pendapat yang sejalan.

Hasil kaji tindak di era reformasi pasca 1998, terbukti bahwa model penyuluhan yang partisipatif efektif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat model desa mandiri. Pengalaman tersebut diperoleh secara nyata oleh penulis di Karawang kawasan Pantura Jawa (Surya *et al*, 2003), di Sukabumi kawasan Pantai Selatan Jawa (Prastowo *et al*, 2009), di desa-desa sekitar Tambang di Kalsel (Sumardjo *et al*, 2009) dan pengembangan berbasis komunitas tentang kelembagaan lubang pangan (Sumardjo *et al*, 2003) di Jawa Tengah dan di Jawa Barat serta di beberapa lokasi lainnya. Demikian pula hasil kajian implementasi Program Primatani di Sulsel dan Jawa Barat (Sumardjo, *et al*, 2008). Pemikiran tentang penyuluhan partisipatif ini telah mewarnai perubahan paradigma



penyuluhan di Indonesia, tercermin dari nuansa paradigmatik dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Tulisan ini mengupas bagaimana pendekatan yang tepat untuk memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan pembangunan diangkat berdasarkan pengalaman penulis tentang pengembangan kapital manusia dan kapital sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran ini terinspirasi oleh filosofi penyuluhan itu sendiri, yaitu : “menolong orang untuk menolong dirinya sendiri melalui pendidikan non formal, untuk mampu memperbaiki kualitas kehidupan diri, keluarga dan masyarakatnya”. Penyuluhan pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perilaku seseorang atau individu, yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik/ konatif sehingga memiliki individualitas (*human capital*, bukan individualistis) yang siap mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya.

Banyak praktek-praktek penyuluhan yang menyimpang dari filosofi penyuluhan (secara non partisipatif). Akibatnya tidak berfungsi memberdayakan bahkan sebaliknya cenderung memperdaya masyarakat (Sumardjo, 2008). Faktanya masyarakat menjadi tergantung terhadap petunjuk, anjuran atau instruksi dari pemerintah atau pihak lain penyelenggara ‘penyuluhan’. Pendekatan penyuluhan non partisipatif, biasanya sarat dengan kepentingan pihak di luar petani. Permasalahannya adalah banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat, akademisi di perguruan tinggi maupun aparat pemerintahan yang memiliki persepsi kurang tepat sehingga tidak menerapkan filosofi penyuluhan (Sumardjo, 1999).

Persepsi yang kurang tepat tersebut antara lain penyuluhan disamaartikan dengan sekedar ceramah atau proses pencerangan, sebagai instruksi, sebagai indoktrinasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengalkan kepentingan yang wajar-IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menginkan kepentingan yang wajar. IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pendekatan-pendekatan *top down* dan dengan pola komunikasi searah (*linear*), kurang edukatif persuasif, non partisipatif dan non demokratis. Praktek penyuluhan menyimpang dari filosofi penyuluhan karena penyuluhan dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya kurang memiliki kompetensi profesional penyuluh. Hasil penelitian Sumardjo dan disertasi b...bingannya menunjukkan tingkat kompetensi penyuluh sekitar 56-77 pada selang skor 0-100.(Sumardjo, 2009a).

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) yang belakangan menjadi lebih populer, sejarahnya berasal dari penerapan pendidikan massa (*mass education*) dan hal itu merupakan salah satu pendekatan dalam penyuluhan. Pengembangan masyarakat tanpa disertai peningkatan kualitas perilaku manusianya secara efektif (penyuluhan) hanya merupakan upaya pemberdayaan yang semu dan terjebak pada bentuk-bentuk rekayasa sosial oleh pihak luar yang kurang bermanfaat bagi masyarakat (Sumardjo, 2008).

Kerangka Berpikir

Tantangan ke depan dalam pengembangan penyuluhan adalah bagaimana penyuluhan efektif mengembangkan kapital manusia melalui peningkatan kapasitas warga masyarakat dalam mengembangkan energi sosial budaya kreatif sebagai kapital sosial (Sumardjo, 2009a). Kapital sosial diperlukan masyarakat untuk menjadi berdaya memenuhi kebutuhan kejahteraannya.

Pengembangan masyarakat idealnya efektif mengembangkan energi sosial budaya kreatif masyarakat yang bersangkutan (G...hen dan Uphoff, 1977; Uphoff, 1986; Sumardjo, 1994; dan Sayogyo (1994). Energi sosial budaya kreatif meliputi tiga elemen, yaitu *ideals*, *ideas*, dan *friendships*. *Ideals* adalah kondisi ideal yang ingin dicapai atau diwujudkan